

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah dapat mempengaruhi perekonomian makro melalui dua kebijakan, yakni kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Sebagai negara yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, fungsi yang melekat untuk memajukan kesejahteraan umum dalam kesejahteraan negara membuat beberapa konsekuensi dari administrasi pemerintah yang harus berperan aktif untuk memajukan bidang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Untuk itu pemerintah memberikan tanggung jawab pelayanan publik¹ sehingga pelayanan publik dapat diterapkan dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal.

Pemerintah mendapat kebebasan tertentu dalam bertindak dan mengambil keputusan atas penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat yang perlu ditangani dengan cepat, jika masalah ini masih belum ditetapkan dalam dasar hukum oleh legislatif, maka dalam hukum administrasi diberikan kewenangan bebas berupa diskresioner.² Dimana kebijakan diskresi ini dilakukan oleh badan legislatif untuk mengambil keputusan baru yang telah ditetapkan sebelumnya namun masih dibawah payung undang-undang.

¹ Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik "Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik

² Nogi. S, Hessel, *Manajemen Publik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), p.244

Kebijakan publik sangat erat hubungannya dengan peranan pemerintah dalam alokasi sumber ekonomi yang optimal sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat yang tinggi.³ Di sisi lain pemerintah memiliki dua konsep kebijakan ekonomi utama, yakni kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter mengendalikan sektor moneter, sedangkan kebijakan fiskal mengelola anggaran pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.

Peranan kebijakan fiskal dalam menstimulasi perekonomian masih hangat untuk diperbincangkan semenjak krisis finansial bulan Juli pada tahun 1997 melanda negara-negara di Asia seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, Korea Selatan, Hongkong, Filipina dan resesi Jepang.⁴ Peranan kebijakan fiskal telah meningkat namun pemerintah belum dapat maksimal dalam mengelola pengeluaran atau belanja pemerintah pusat.

Kebijakan fiskal dapat tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan realisasinya. Pada pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998, kebijakan fiskal pemerintah sangat ketat dan bertujuan untuk meningkatkan surplus APBN. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah mulai dengan program penyesuaian harga minyak dan listrik, yaitu dengan mengurangi subsidi. Hal lain yang dilakukan adalah dengan memperkenalkan pajak penjualan barang mewah dan pajak bumi dan bangunan. Hal yang paling penting adalah rencana untuk meningkatkan sistem struktur pajak.

³ Guritno Mangkoesobroto, *Ekonomi Publik*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2001), p.2

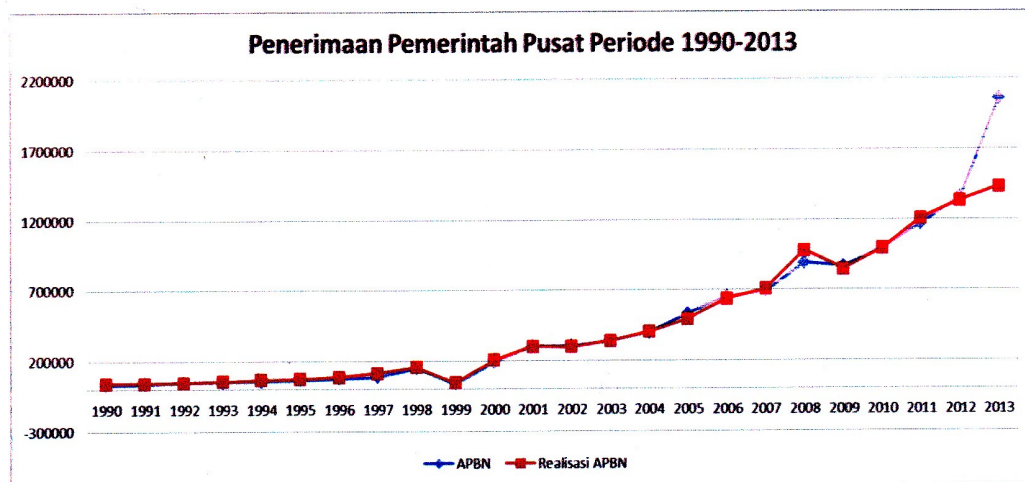
⁴ http://id.m.wikipedia.org/wiki/Krisis_finansial_Asia_1997, diakses pada tanggal 19 Maret 2015

Tabel I.1 Presentase Anggaran dan Realisasi APBN Terhadap PDB Tahun 2012
(dalam triliun rupiah)

Uraian	2012			
	APBN-P	persen thd PDB	Realisasi	persen thd PDB
Pendapatan Negara dan Hibah	1.358,20	16,48	1.338,31	16,24
1. Penerimaan Perpajakan	1.016,23	12,33	980,52	11,89
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	968,29	11,75	930,86	11,29
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	47,94	0,58	49,66	0,60
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	341,15	4,14	352,00	4,28
a. Penerimaan GDA	217,16	2,63	225,87	2,75
b. Pendapatan Bagian Laba BUMN	30,78	0,37	30,80	0,37
c. Pendapatan PNBP lainnya	72,80	0,88	73,63	0,89
d. Pendapatan BLU	20,41	0,25	21,70	0,26
3. Penerimaan Hibah	0,82	0,01	5,79	0,07
Belanja Negara	1.548,31	18,79	1.491,17	18,09
1. Belanja Pemerintah Pusat	1.069,54	12,98	1.010,53	12,26
a. Belanja Pegawai	212,97	2,58	197,86	2,40
b. Belanja Barang	160,03	1,94	140,88	1,71
c. Belanja Modal	182,62	2,22	145,10	1,76
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	117,79	1,43	100,51	1,22
e. Belanja Subsidi	245,08	2,97	346,42	4,20
f. Belanja Hibah	1,79	0,02	0,07	0,00
g. Belanja Bantuan Sosial	80,72	0,98	75,62	0,92
h. Belanja Lain-lain	68,54	0,83	4,07	0,05
2. Transfer ke Daerah	478,77	5,81	480,64	5,83
a. Dana Perimbangan	408,35	4,95	411,29	4,99
i. Dana Bagi Hasil	108,42	1,32	111,54	1,35
ii. Dana Alokasi Umum	273,81	3,32	273,81	3,32
iii. Dana Alokasi Khusus	26,12	0,32	25,94	0,31
b. Otonomi Khusus dan Penyesuaian	70,42	0,85	69,35	0,84
i. Dana Otonomi Khusus	11,95	0,14	11,95	0,14
ii. Dana Penyesuaian	58,47	0,71	57,40	0,70
Defisit Anggaran	(190,11)	(2,31)	(153,10)	(1,86)
Pembiayaan	190,11	2,31	174,96	2,12

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Dalam tabel I. 1 tercermin bahwa rasio APBN terhadap PDB menurun dari APBN-P pos pendapatan negara dan hibah sebesar 16,48 % ketika realisasi turun menjadi 16,24 % lalu pada pos belanja negara rasio APBN-P terhadap PDB adalah sebesar 18,79 % ketika realisasi turun menjadi 18,09 % selisih yang cukup besar.



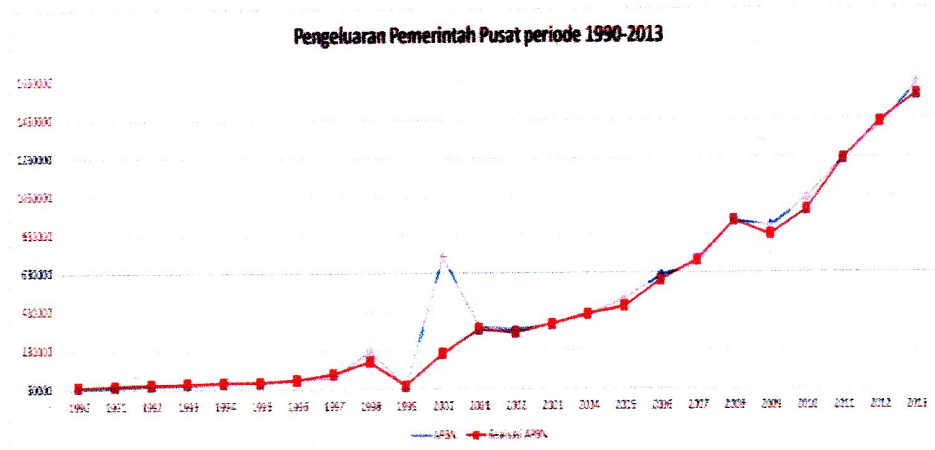
Grafik I.1 Penerimaan Negara (pajak & non pajak) periode 1990-2013

Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Bank Indonesia
*data diolah oleh penulis

Dapat dilihat pada grafik I.1, dimana penerimaan pemerintah pusat yang bersumber dari pajak dan bukan pajak baik anggaran maupun realisasinya setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Keadaan penerimaan negara sebelum krisis 1998 melanda cukup stabil dan yang direncanakan sesuai dengan realisasinya. Namun, pada tahun 1999 pasca krisis penerimaan negara ditargetkan rendah guna menutupi utang dan memulai memperbaiki perekonomian nasional. Terlihat jelas bahwa realisasi tahun 2008 lebih unggul dibandingkan anggarannya dan pada tahun 2013 justru tidak sesuai target, berarti bahwa realisasi penerimaan

pada tahun 2013 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Selisihnya cukup jauh sebesar Rp 622.833 Miliar.

Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan target, pasti akan mengalami hal buruk yang tidak diinginkan, bisa diperbaiki jika mengambil keputusan yang tepat, sama dengan halnya suatu perekonomian, akan sangat berdampak buruk pada sektor publik dan ekonomi jika apa yang telah ditetapkan namun tidak terlaksana. Yang seharusnya penerimaan sudah ditetapkan untuk alokasi dan distribusi sektor ini dan sektor itu, justru terpangkas disebabkan realisasi anggaran yang tidak mencapai target. Namun dalam hal ini, pemerintah memiliki beberapa kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan dan diputuskan dalam waktu yang singkat dan terdesak. Sama halnya dengan pos penerimaan pemerintah pusat yang tertera pada gambar 1.1, belanja pemerintah pusat pun juga mengalami pencapaian target yang tidak sesuai.



Gambar 1.2 Pengeluaran pemerintah periode 1990 – 2013

Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Bank Indonesia
*data diolah oleh penulis

Tidak berbeda jauh dengan penerimaannya, pada pengeluaran pemerintah pusat juga mengalami perencanaan yang tidak sesuai target. Terutama pada tahun 2000, anggaran yang direncanakan jauh lebih besar daripada realisasinya, dan pada tahun 2009, 2010 dan 2013 realisasi pengeluaran tidak mencapai target perencanaan anggaran yang telah ditetapkan. Untuk itu, membutuhkan kebijakan-kebijakan khusus yang tepat dalam perubahan kebijakan yang telah ditetapkan, dalam menghadapi perubahan siklus ekonomi dari faktor internal-eksternal.

Kasus lain di Indonesia, mengenai inkonsistensi kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan para legislator di negara ini memang mengundang kontroversi di berbagai lapisan masyarakat bahkan antar kementerian, berikut kutipannya dari koran *Bisnis online*:

Inkonsistensi acap datang dari sekaligus melahirkan inkonsistensi yang lain. Di sudut sana kita melihat, alih-alih menaikkan harga atau memberesi pembatasan konsumsi, pemerintah malah menambah subsidi BBM di APBNP 2014, melawan arus pengetatan dan mengambil risiko kenaikan utang akibat melebarnya defisit. Beberapa bulan sebelumnya, kita juga melihat di sudut lain, bagaimana pajak penjualan barang mewah (PPnBM) pendingin ruangan (AC) ≤ 1 PK dan kulkas berkapasitas ≤ 180 liter dibebaskan, meski pada saat yang sama laju pertumbuhan impor sedang gencar-gencarnya ditekan.⁵

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa pokok persoalannya adalah adanya berbagai inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam praktik kebijakan

⁵Fatkul Maskur, *Proyeksi Perekonomian Balada Inkonsistensi Kebijakan*, <http://m.bisnis.com/finansial/read/20140521/9/229597/proyeksi-perekonomian-balada-inkonsistensi-kebijakan>, diakses pada tanggal 19 Maret 2015

pengetatan ini, sepertinya telah dicampurtangani oleh beberapa orang yang berkepentingan masuk ke dalam paket kebijakan ekonomi yang ditujukan atas nama pengetatan untuk melawan laju impor dan konsumsi. Yang notabeneanya masih banyak barang yang di impor oleh negara kita namun tidak dikenakan pajak barang mewah, seperti *handphone*, *smartphone* merupakan salah satu produk impor yang tertinggi persentasenya dari total impor non-migas nasional.

Dalam hal ini terlihat jika memang di atasnamakan kebijakan pengetatan, pemerintah berarti menahan kenaikan belanja modal terutama infrastruktur, tapi pada saat yang sama pemerintah memberikan pembebasan PPnBM pada para produsen 'mobil murah' yang semuanya dikuasai asing, jika banyak mobil murah di konsumsi oleh masyarakat, secara tidak langsung mereka akan membeli BBM dan sekaligus meningkatkan labanya.

Bank Indonesia dan Dana Moneter Internasional (IMF) mengundang Finn E Kynland sebagai pembicara inti dalam seminar bertema *Marrying Time Consistency in Monetary Policy with Financial Stability: Strengthening Economic Growth* di Nusadua, Bali, 1-3 Desember 2005 berikut kutipannya:

Konsistensi kebijakan ditentukan oleh berbagai faktor, seperti kondisi politik. Kalau suatu negara menginginkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam jangka panjang, konsistensi kebijakan sangat dibutuhkan. Jika tidak, jangan berharap ekonomi suatu negara bisa tumbuh. Pemerintah harus konsisten dalam menerapkan kebijakan untuk menjaga kredibilitas. Jika tidak, investor asing enggan menanamkan modalnya.⁶

⁶Karidun Pardosi, *konsistensi kebijakan penting untuk pertumbuhan*, <http://m.detik.com/news/read/2005/12/02/084031/490815/158/konsistensi-kebijakan-penting-untuk-pertumbuhan>, diakses pada tanggal 19 Maret 2015

Dalam kutipan diatas telah dinyatakan sangat jelas bahwa konsistensi dalam kebijakan sangat penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara selain itu untuk menjaga kredibilitas pemerintah di mata masyarakat. Yang berarti dapat diumpamakan bahwa di setiap adanya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kemungkinan besar akan terjadi inkonsistensi dan kredibilitas yang rendah dalam pelaksanaannya di mata masyarakat. Isu kredibilitas kebijakan moneter berkaitan erat dengan masalah *inconsistency*. Kebijakan yang bersifat *inconsistency* akan berpotensi menyebabkan rendahnya kredibilitas kebijakan fiskal maupun moneter, sehingga pelaku ekonomi akan membentuk ekspektasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan target yang diumumkan.

Tantangan lain yang muncul pasca-krisis ekonomi juga berkaitan dengan dihentikannya kerja sama dengan IMF pada akhir 2003. Setelah 6 tahun bekerja sama dengan IMF, maka tantangan yang muncul setelah menyelesaikan kerja sama dengan IMF adalah gap pembiayaan/ defisit anggaran dan gap kredibilitas.⁷

Pasang surut perekonomian adalah suatu hal yang alamiah, bahkan seolah sudah menjadi salah satu karakteristik atau sifat dari perekonomian pasar. Pertumbuhan ekonomi tinggi atau gelombang pasang terkadang dapat dipertahankan untuk jangka waktu relatif lama (misal 5 tahun, 10 tahun atau bahkan lebih), tetapi seringkali hanya dapat bertahan dalam jangka waktu yang

⁷ Adiningsih, Sri. Rahutami, Ika & Anwar, P. R, *Satu Dekade Pasca-Krisis Indonesia*, (Yogyakarta: PSAP UGM, PT Elex Media Komputindo, 2006), p.248

relatif singkat kemudian mengalami gelombang surut tersebut terjadi karena faktor internal maupun eksternal.

Faktor internal dapat berupa kebijakan pemerintah seperti *tight money policy*, kebijakan surplus anggaran atau kebijakan fiskal dan investasi yang bersifat kontraktif. Faktor eksternal yakni, faktor-faktor yang berada di luar kendali pemerintah seperti penurunan harga minyak bumi, bencana alam, kegagalan panen karena musim kemarau yang panjang atau serangan hama, dan resesi ekonomi dari negara-negara yang menjadi mitra dagang utama.⁸ Faktor-faktor ekonomi tersebut, baik internal maupun eksternal, baik sendiri-sendiri maupun secara bersamaan dapat mempengaruhi gerak gelombang pasang surut perekonomian. Tidak hanya di pemerintah pusat, faktor eksternal yang terjadi pada pemerintah daerah pun tidak sedikit, salah satunya adalah dibawah ini keputusan Kemendagri terhadap pemerintah daerah, mengutip dari artikel koran *Republika online*:

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai penting hak diskresi diberikan kepada kepala daerah yang tertuang dalam RUU Administrasi Pemerintahan. Hal itu kalau dikaitkan dengan banyaknya bencana yang terjadi di Tanah Air belakangan ini.⁹

Dalam suatu perekonomian terbuka seperti sekarang ini, kondisi dan perkembangan perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama adalah “pasar” yang didominasi dan dikendalikan oleh pelaku

⁸ Muhammad Hisyam, *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), p.237

⁹ <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/01/21/mgz11q-kemendagri-keluarkan-perppu-majukan-pemilukada>, diakses pada tanggal 29 November 2014

ekonomi di negara-negara maju. Selain ketidakberesan dan ketidakmampuan pemerintah dalam menangani permasalahan-permasalahan sosial, politik dan keamanan di dalam negeri segera merupakan sinyal negatif bagi pasar, yang diwujudkan dalam bentuk penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG) dan melemahnya kurs mata uang domestik. Bahkan susunan personalia kabinet terutama tim yang menduduki posisi kunci dalam bidang perekonomian juga sudah masuk dalam perhitungan bisnis para pelaku ekonomi. Sebelum krisis ekonomi, pergerakan kurs mata uang dan IHSG tidak terlalu berfluktuatif, tetapi semenjak krisis ekonomi perubahan kedua indikator finansial tersebut begitu sensitif terhadap faktor-faktor ekonomi, sosial, politik dan keamanan.

Mengenai masalah sistem transfer dana pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, masih bisa dibilang kontroversial, karena belum ada alur pendanaan dan porsi formula yang konsisten dalam pembagian dana di tiap daerah, seperti di kutip dari koran *online* okezone.com sebagai berikut:

Sejak 2002 ternyata juga terdapat transfer fiskal yang ditetapkan di luar ketiga jenis dana perimbangan tersebut yang nomenklaturnya berubah-ubah. Di berbagai negara lain, transfer fiskal semacam itu dikenal dengan sebutan intergovernmental fiscal transfer dan di Indonesia dikenal dengan nama dana *ad hoc*. Keberadaan dana *ad hoc* tersebut di negara lain seperti di Amerika Serikat sering dikaitkan dengan kepentingan dukungan politis bagi politisi yang sering dikenal dengan sebutan pork barrel. Proyek *Gravina Island Bridge* yang juga dikenal sebagai "Jembatan to Nowhere" di Alaska adalah contoh dari adanya pork barrel. Rencana pembangunan jembatan itu, yang akhirnya dibatalkan, digunakan untuk kepentingan konstituen yang menjadi pendukung senator Ted Stevens dari Partai Republik. Filipina pernah mengalokasikan anggaran yang cukup besar sampai sejumlah 200 juta peso untuk setiap senator dan 70 juta untuk setiap representatif yang sering

disebut dengan program *Priority Development Assistance Fund*. Titik rawan dari keberadaan pola transfer fiskal adalah absennya pengaturan pola pendanaan semacam itu dalam UU No 33 Tahun 2004 yang mengatur perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintahan daerah.¹⁰

Pengaturan yang lebih spesifik mekanisme transfer ini belum diberikan kepada masyarakat, termasuk mekanisme yang lebih detail tentang pembagian dari sumber-sumber transfer diantara pusat dan daerah.¹¹ Rancangan pemerintah tersebut juga belum diikuti dengan penjelasan tentang pengaturan pembagian kewenangan, seperti fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing tingkatan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan jasa/sarana publik serta implikasi kewenangan dan tanggung jawab finansial (*expenditure* dan *tax assignment* dari masing-masing tingkat pemerintahan). Ketua BPK Anwar Nasution menyebutkan, opini pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada periode 2004-2007 memberikan gambaran yang mengecewakan.¹² Dengan demikian diperlukan pula kesiapan pemerintah daerah dari aspek infrastruktur maupun SDM, sehingga pengembalian dana ke daerah juga disertai dengan penerapan sistem akuntabilitas yang transparan.

Pada dekade 1980-an, Sumitro Djohadikusumo melansir, kebocoran anggaran negara mencapai 30% setiap tahunnya. Di sisi lain, riset CIDES pada akhir 1980-an juga menyampaikan, biaya

¹⁰Riawan Tjandra, *transfer dana pusat-daerah*, <http://m.okezone.com/read/2012/07/09/212/660535/transfer-dana-pusat-daerah>, diakses pada tanggal 21 Maret 2015

¹¹ Hadi Soesastro, Budiman, Aida, *Pemikiran dan permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam setengah Abad Terakhir: Paruh Pertama Ekonomi Orde Baru*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005a). p.549

¹² Harian Kompas, *Keuangan Daerah didera banyak Masalah*, <http://www.bpk.go.id/news/keuangan-daerah-didera-banyak-masalah>, diakses pada tanggal 15 Desember 2014

produksi perusahaan menimbulkan *high cost economy*. Bahkan, hingga saat ini pun, potensi kebocoran APBN terus menggelayut¹³.

Kebocoran Anggaran Negara (keuangan negara) bisa terjadi dalam pelaksanaan Anggaran Pembangunan maupun pelaksanaan Anggaran Rutin¹⁴. Ini bisa terjadi meskipun untuk pelaksanaan tata usaha/ pengelolaan keuangannya telah ada berbagai peraturan dan ketetapan, dan aparat pemeriksa/ pengawas pun telah disiapkan. Pemerintah telah menempuh berbagai cara untuk memperbaiki keadaan demikian, namun hasilnya pemborosan dan kebocoran negara tetap terjadi. Kebocoran anggaran terjadi akibat kurangnya kontrol sosial. Hal ini menunjukkan adanya anomali dalam proses sosial-politik Indonesia saat itu.

Dengan melihat latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, ini sangat mendukung peneliti dalam meneliti tingkat kecukupan diskresi pada pemerintah pusat, dapat dikemukakan bahwa diskresi kebijakan fiskal rencana dan realisasi anggaran pemerintah pusat di bidang penerimaan maupun belanja pemerintah secara dapat membawa dampak yang sangat luas bagi perekonomian dalam negeri. Secara lebih spesifik, penelitian ini dibuat untuk menemukan jawaban yang konkrit. Berdasarkan uraian diatas dengan menyadari gejala-gejala atau kenyataan tersebut selain itu masih sedikitnya penelitian tentang diskresi kebijakan fiskal pada keuangan pemerintah pusat, maka peneliti sangat tertarik untuk menjadikannya topik pembahasan lebih mendalam.

¹³ *Korupsi Politik dan Politik Korupsi*, <http://ekoprasojo.com/2012/04/03/korupsi-politik-dan-politik-korupsi/>, diakses pada tanggal 27 November 2014

¹⁴ Gilarso, T, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius Anggota IKAPI, 2004), p.144-145

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya diskresi di Indonesia, diantaranya:

1. Inkonsistensi kebijakan menunjang tingginya tingkat diskresi pada penerimaan dan/atau pengeluarannya.
2. Kredibilitas pemerintah pusat menunjang tingginya tingkat diskresi pada penerimaan dan/atau pengeluarannya.
3. Faktor eksternal menunjang tingginya tingkat diskresi pada penerimaan dan/atau pengeluarannya.
4. Mekanisme transfer dari pusat ke daerah menunjang tingginya tingkat diskresi pada penerimaan dan/atau pengeluarannya.
5. Kebocoran anggaran menunjang tingginya tingkat diskresi pada penerimaan dan/atau pengeluarannya.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, ternyata masalah tentang kebijakan diskresi dalam lingkup anggaran pemerintah pusat memiliki beberapa faktor yang kompleks. Oleh karena itu peneliti membatasi masalah pada “analisis kebijakan diskresi yang terjadi pada penerimaan dan/atau pengeluaran pemerintah pusat”.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka masalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pemerintah pusat memiliki Tingkat Diskresi yang Tinggi dalam Mengelola Penerimaannya?
2. Apakah pemerintah pusat memiliki Tingkat Diskresi yang Tinggi dalam Mengelola Pengeluarannya?

E. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah referensi serta khasanah ilmu pengetahuan mengenai kebijakan diskresi fiskal yang terjadi pada rancangan APBN serta realisasinya.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk bahan acuan, masukan, serta referensi bagi peneliti selanjutnya dan juga penelitian ini dapat digunakan sebagai variabel penelitian selanjutnya mengenai kebijakan diskresi fiskal rancangan APBN serta realisasinya.